PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**INSPEKTORAT DAERAH**

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: http://www.inspektorat.bantulkab.go.id Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANTUL
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD), PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, PENGURUS GAJI, PENGELOLA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR KABUPATEN BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditunjuk Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus Gaji, Pengelola Urusan Kepegawaian dan Pembantu Pengurus Barang Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun anggaran 2023;

b. bahwa terjadi rotasi, mutasi, promosi dan penetapan perintah pelaksana tugas Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul maka perlu disesuaikan Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pembantu Pejabat Penatausahaan

Keuangan SKPD, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus Gaji, Pengelola Urusan Kepegawaian dan Pembantu Pengurus Barang Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); dan
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125).

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD), PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, PENGURUS GAJI, PENGELOLA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memiliki tugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran (PA) antara lain:
   a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
   b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
   c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD antara lain:
   a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
   b. menyiapkan SPM;
   c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
   d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
   e. menyusun laporan keuangan SKPD.
3. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) memiliki tugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD.
4. Pembantu Bendahara Pengeluaran memiliki tugas membantu Bendahara Pengeluaran dalam menjalankan tugas dan wewenang antara lain:
   a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
   b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
   c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
   d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pengurus Gaji memiliki tugas dan wewenang antara lain:

a. menyiapkan usulan peremajaan data gaji;

b. meneliti dan mengoreksi daftar gaji yang dicetak oleh BKAD;

c. menyiapkan SPP gaji berdasar daftar gaji;

d. menyiapkan SPP rapel/kekurangan gaji, uang duka dan lain-lain;

e. membayar gaji kepada pegawai;

f. mencatat penerimaan dan pengeluaran gaji pada buku kas pembantu khusus gaji;

g. membukukan potongan pihak ketiga (IWP, PPh Pasal 21, Taperum);

h. melaksanakan pengelolaan gaji sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

6. Pengelola Urusan Kepegawaian memiliki tugas mengelola urusan kepegawaian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; dan

7. Pembantu Pengurus Barang memiliki tugas membantu Pengurus Barang dalam menjalankan tugas dan wewenang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Inspektur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 06 Februari 2023

Inspektur

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740322 199311 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Bupati Bantul;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANTUL
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD), PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, PENGURUS GAJI, PENGELOLA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | NAMA | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1. | Ari Purwaningsih, S.E., M.Si<br>NIP. 196811091990082001 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) |
| 2. | Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si.<br>NIP. 196811141996031003 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) |
| 3. | Lies Ratriana Nugrohowati, S.IP., M.Si.<br>NIP. 196711031996032001 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) |
| 4. | Ir. Suryono, M.Si.<br>NIP. 196707211994031004 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) |
| 5. | Hartana, S.H., M.H.<br>NIP. 197505092002121005 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) |
| 6. | Sulami, S.E., M.Acc.<br>NIP. 196709281992032006 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) |
| 7. | Dwi Trisnawati, S.E.<br>NIP. 198409152010012031 | Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) |
| 8. | Oky Rahayu Kitri Wijaya, S.STP<br>NIP. 199510242018081002 | Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK-SKPD) |
| 9. | Anita Sari, S.H.<br>NIP. 199403172020122024 | Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK-SKPD) |
| 10. | Suharyanta<br>NIP. 197703102009031002 | Pembantu Bendahara Pengeluaran |
| 11. | Sri Widiastuti<br>NIP. 196811152014062001 | Pengurus Gaji |
| 12. | Tutik Haryanti, A.Md.<br>NIP. 197508142014062004 | Pengelola Urusan Kepegawaian |
| 13. | Adiningdyah Mustikasari W, A.Md.<br>NIP. 199709032019022001 | Pembantu Pengurus Barang |

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 06 Februari 2023

Inspektur

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740322 199311 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANTUL
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD), PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, PENGURUS GAJI, PENGELOLA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023
PER PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

| | |
|---|---|
| Nama | Ari Purwaningsih, S.E., M.Si |
| Jabatan | Sekretaris |
| Pagu (Rp) | 10,791,403,921 |

| **Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan** | **Pagu (Rp)** |
|---|---|
| 1 | 2 |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 10,760,666,621 |
| **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **13,600,000** |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11,350,000 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2,250,000 |
| **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **8,750,719,736** |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8,612,694,736 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 134,050,000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3,975,000 |
| **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **463,384,000** |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 10,000,000 |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 453,384,000 |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1,107,646,705** |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2,971,745 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 390,157,380 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 39,963,000 |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 23,051,500 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 7,500,000 |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 27,500,000 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 516,182,080 |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 55,021,000 |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 45,300,000 |
| **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **234,286,880** |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 6,000,000 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 45,980,000 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 182,306,880 |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **191,029,300** |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 173,529,300 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 17,500,000 |

| | |
|---|---|
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 30,737,300 |
| **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **30,737,300** |
| Kerja Sama Pengawasan Internal | 4,891,300 |
| Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 25,846,000 |

| | |
|---|---|
| Nama | Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si. |
| Jabatan | Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur |
| Pagu (Rp) | 588,872,800 |
| **Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan** | **Pagu (Rp)** |
| **1** | **2** |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 588,872,800 |
| **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **588,872,800** |
| Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 139,157,600 |
| Reviu Laporan Kinerja | 224,857,600 |
| Pengawasan Desa | 224,857,600 |

| | |
|---|---|
| Nama | Lies Ratriana Nugrohowati, S.IP., M.Si. |
| Jabatan | Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah |
| Pagu (Rp) | 235,465,200 |
| **Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan** | **Pagu (Rp)** |
| **1** | **2** |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 235,465,200 |
| **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **235,465,200** |
| Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 139,157,600 |
| Reviu Laporan Keuangan | 96,307,600 |

| | |
|---|---|
| Nama | Sulami, S.E., M.Acc. |
| Jabatan | Plh. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan |
| Pagu (Rp) | 255,482,600 |
| **Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan** | **Pagu (Rp)** |
| **1** | **2** |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 80,482,600 |
| **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** | **80,482,600** |
| Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 80,482,600 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | 175,000,000 |
| **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | **175,000,000** |
| Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan | 175,000,000 |

| | |
|---|---|
| Nama | Ir. Suryono, M.Si. |
| Jabatan | Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian |
| Pagu (Rp) | 152,398,700 |

| Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan | Pagu (Rp) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 152,398,700 |
| **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | **57,316,100** |
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 49,157,600 |
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 8,158,500 |
| **Pendampingan dan Asistensi** | **95,082,600** |
| Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 95,082,600 |

| | |
|---|---|
| Nama | Hartana, S.H., M.H. |
| Jabatan | Inspektur Pembantu Bidang Investigasi |
| Pagu (Rp) | 1,521,823,020 |

| Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan | Pagu (Rp) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 25,795,100 |
| **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** | **25,795,100** |
| Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 25,795,100 |
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 1,496,027,920 |
| **Pendampingan dan Asistensi** | **1,496,027,920** |
| Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 54,082,600 |
| Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 1,390,987,720 |
| Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 50,957,600 |

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 06 Februari 2023

Inspektur

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740322 199311 1 002